
**PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN,
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERN DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA
MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BADUNG**

**Ni Putu Riska Fernanda Dewi¹
Ni Putu Yuria Mendra²
Putu Wenny Saitri³**

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Mahasaraswati Denpasar
Email: yuriamendra@gmail.com

Abstract

Financial statements that are relevant and reliable are used as the basis for making economic decisions. Local government financial management must be carried out based on good government governance, namely financial management that is carried out in a transparent and accountable manner, which allows users of financial statements to be able to access information about the results achieved in the administration of local government. This study aims to examine and obtain empirical evidence of the effect of the application of financial accounting systems, the use of information technology, internal control systems and human resource competencies on the quality of the financial statements of the local government of Badung Regency. The research population is the people of SKPD in the Badung Regency Government, which is as many as 112 people. The sample in this study was 70 people who were determined based on the purposive sampling method. This study uses data collection methods, namely questionnaires and documentation. The analysis technique used is multiple linear regression analysis. The results showed that the application of financial accounting systems and human resource competencies had a positive effect on the quality of financial reports, while the use of information technology and internal control systems had a negative effect on the quality of financial reports. Further research can develop this research by using other variables that in theory have an influence on the quality of financial statements, such as the level of accounting understanding and work experience.

Keywords: *financial accounting system, information technology, internal control, human resource competence, quality of financial reports.*

PENDAHULUAN

Di era persaingan yang sangat ketat seperti sekarang ini, reformasi terhadap pengelolaan keuangan dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mensyaratkan bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun dan disajikan dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah dan dalam Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 juga telah menjelaskan Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang digunakan untuk menginformasikan posisi keuangan perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau para *stakeholder*. Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Revisi 2009 Tahun 2012, tujuan laporan keuangan adalah memberikan

informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Namun demikian, laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dan kejadian masa lalu, dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi.

Pengelolaan keuangan pemerintah daerah harus dilakukan berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*), yaitu pengelolaan keuangan yang dilakukan secara transparan dan akuntabel, yang memungkinkan para pemakai laporan keuangan untuk dapat mengakses informasi tentang hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Menurut IMF dalam Sudaryo (2017:46) menyebutkan bahwa prinsip akuntabilitas dalam pemerintahan akan terwujud apabila: terdapat kejelasan tugas dan wewenang dalam struktur organisasi pemerintahan, ketersediaan sistem informasi bagi publik mengenai pemerintahan, sistem anggaran yang terbuka, dan adanya lembaga independen yang mengawasi seluruh proses pemerintahan.

Pemerintah Daerah mempunyai Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) berupa proses mulai dari pencatatan sampai pelaporan aktivitas transaksi (Pasal 1, Permendagri 13/2006). SAKD menyediakan catatan yang lengkap mengenai pertanggungjawaban pengelolaan dana yang akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Pasal 5, PP 58/2008). SAKD yang dilaksanakan sesuai ketentuan akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas (Defitri, 2018). Implementasi sistem yang baik tidak dapat tercapai dengan sukses apabila individu yang menjalankan sistem tersebut tidak mendukungnya (Pujanira dan Taman, 2017). Masalah kompetensi sumber daya manusia menjadi tantangan bagi setiap pegawai pemerintahan karena berdasarkan fenomena yang ditemui masih ada kesenjangan antara kompetensi sebagai syarat tugas pokok dengan kompetensi yang dimiliki, akibatnya pegawai kurang memahami tentang pengelolaan keuangan (Saifudin, 2017).

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawasan Keuangan (BPK), ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara wajar dan berkualitas. Terdapat empat opini yang diberikan BPK yaitu: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TW), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI Pemerintah Daerah Kabupaten Badung berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Pada tahun 2020. Raihan opini WTP ini merupakan prestasi kali keenam secara berturut-turut yang dicapai Pemkab Badung, hal ini menunjukkan komitmen Pemerintah Badung beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap kualitas penyusunan laporan keuangan yang dihasilkan. Salah satu hal yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008. Menurut Mulyadi menyebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen. Sistem Pengendalian Intern (SPI) memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektifitas dan efisiensi akuntansi terutama dalam menciptakan keandalan laporan keuangan. Penerapan SPI mampu meningkatkan reliabilitas, objektivitas informasi dan mencegah inkonsistensi serta memudahkan proses audit laporan keuangan, semakin baik SPI pemerintahan maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula. Dalam penelitian

Kamusi (2019) menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan Aida (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Laporan keuangan yang berkualitas dihasilkan oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkompeten dibidang pengelola keuangan. SDM harus memiliki kompetensi dibidang akuntansi dalam pembuatan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan agar laporan keuangan tersebut memiliki kualitas yang baik. Namun sudah jadi permasalahan umum yang terjadi di pemerintahan khususnya pemerintah daerah bahwa untuk menerapkan manajemen sumber daya manusia, seringkali yang dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara kuantitas maupun kualitas. Kegagalan sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah, sehingga diharapkan untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan maka dibutuhkan bukan hanya jumlah sumber daya manusia melainkan kompetensi yang dimiliki sumber daya manusia tersebut. Garung (2018) dan Sari (2020) dalam penelitiannya menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumber daya manusia juga harus menguasai teknologi informasi (TI) demi mencapai tujuan organisasi. Perkembangan teknologi informasi tidak hanya dimanfaatkan pada organisasi bisnis tetapi juga pada organisasi sektor publik, termasuk pemerintahan. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Garung (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan Sari (2020) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas laporan keuangan memiliki standar yang harus diterapkan yaitu: (1) standar memberikan pedoman tentang informasi yang harus disajikan dalam laporan posisi keuangan, kinerja, dan aktivitas organisasi bagi pengguna informasi, (2) standar memberikan petunjuk dan aturan tindakan bagi auditor yang memungkinkan pengujian secara hati-hati dan independen saat menggunakan keahlian dan integritasnya, (3) standar memberikan petunjuk tentang kumpulan data yang perlu disajikan berkaitan dengan berbagai variabel yang patut dipertimbangkan dalam bidang perpajakan, regulasi, perencanaan, regulasi ekonomi dan peningkatan efisiensi ekonomi serta tujuan sosial lainnya, (4) standar menghasilkan prinsip dan teori yang penting bagi pihak yang berkepentingan dalam disiplin ilmu akuntansi.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Keagenan

Teori agensi adalah hubungan antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak (*agent*) setuju untuk bertindak dengan persetujuan pihak yang lain (*principal*). Zimmerman pada tahun 1997 menyatakan bahwa *agency problem* terjadi pada semua organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta. Pada sektor swasta, *agency problem* terjadi antara pemegang

saham sebagai principal dan manajemen sebagai agent. Pada sektor publik, *agency problem* terjadi antara pejabat yang terpilih rakyat sebagai agent dan para pemilih (masyarakat) sebagai principal. *Agency problem* muncul ketika prinsipal mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan kepada agen, atau dalam perjanjian kontrak kerja antara prinsipal dan agen. Dalam hubungan kontrak kerja, pihak agent secara moral bertanggung jawab dalam memaksimalkan keuntungan prinsipal, namun di sisi lain agent juga berkepentingan dalam memaksimalkan kesejahteraan mereka sendiri (Girsang, 2015).

Menurut Meisser yang dikutip dari Girsang (2015), terdapat 2 permasalahan agensi yaitu adanya informasi asimetris dimana agen secara umum memiliki lebih banyak informasi dari prinsipal dan terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan, di mana agen tidak selalu bertindak sesuai dengan tujuan kepentingan prinsipal. Akuntabilitas publik adalah sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Girsang, 2015). Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab memberikan informasi yang transparan dan akuntabel, salah satunya yaitu melalui kepatuhan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintahan sekaligus pengungkapan dan penyajian laporan sewajar mungkin.

Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 Pasal 232 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah: “Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.” Uraian ini menunjukkan bahwa keuangan daerah harus dikelola dengan baik agar semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 pasal 4 ayat (1) menyatakan keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Sistem akuntansi adalah prosedur- prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak- pihak di dalam dan di luar organisasi. Organisasi bebas merancang dan menerapkan berbagai prosedur yang diharapkan dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan. Akan tetapi karena informasi yang harus disajikan kepada pihak- pihak di luar organisasi telah diatur dalam standar akuntansi maka organisasi harus merancang sistem akuntansinya yang dapat menghasilkan laporan keuangan sebagaimana ditetapkan dalam standar akuntansi untuk menghasilkan informasi yang sesuai dengan standar akuntansi (Triwardana, 2017).

Garung (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah dan Aida (2019) dalam penelitiannya juga menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

H₁: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Adanya teknologi informasi diharapkan dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat

waktu.

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan Informasi Keuangan Daerah kepada pelayanan publik. Kemajuan teknologi informasi yang pesat serta potensi pemanfaatannya secara luas, maka dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses, mengelola, dan mendayagunakan informasi keuangan daerah secara cepat dan akurat. Pemanfaatan teknologi informasi termasuk teknologi komputer untuk dapat memproses dan menyimpan informasi, dan sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi. Komputer merupakan alat yang dapat melipat gandakan kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya (Darmawan dan Darwis, 2018).

Menurut Setyowati,dkk (2016) dalam penelitiannya Pemanfaatan teknologi informasi akan sangat membantu mempercepat proses pengelolaan data transaksi keuangan, penyajian laporan keuangan, serta dapat menghindari kesalahan dalam melakukan posting dari dokumen buku, jurnal, buku besar, hingga menjadi kesatuan laporan keuangan yang utuh sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian yang di laksanakan Sari (2020) menyatakan bahwa sistem teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang hubungan antara pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₂: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Sistem pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengawasi kinerja sumber daya manusia suatu organisasi serta sangat berperan penting dalam pencegahan dan mendeteksi adanya kecurangan (*fraud*). Permendagri No. 59 tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan sebuah proses yang dirancang untuk memberikan suatu keyakinan yang mencukupi dengan sebuah pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dan keterandalan laporan keuangan, efisiensi, dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal memiliki peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan suatu organisasi baik organisasi bisnis maupun sektor publik seperti organisasi pemerintah.

Aida (2019) dalam penelitiannya menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan serta Chalili (2019) juga menyatakan dalam penelitiannya bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti tentang hubungan antara sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H₃: Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Keberhasilan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas bergantung pada pelaksanaannya atau Sumber Daya Manusia. Di dalam pemerintahan, SDM atau kepegawaian PNS diatur dengan UU Nomor 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian.

Penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Darwanis (2018) menyatakan dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi, memudahkan suatu instansi untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan mencapai tujuan secara efektif dan efisien, keahlian ini dapat diperoleh dari sumber daya

manusia yang berkompeten guna membantu instansi di suatu pemerintahan dalam menyediakan laporan keuangan yang andal. Selain itu menurut (Triyanti, 2017) terdapat pengaruh yang positif antara Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Artinya bahwa semakin baik kompetensi sumber daya manusia maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dapat diajukan dalam penelitian ini:

H₄ : Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Objek penelitian ini adalah pegawai Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Jumlah pegawai SKPD di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung yakni 112 orang. Pemilihan ini dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung karena adanya perbedaan pendapat dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada Pemda Badung. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2016:85) *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dimana anggota sampel akan dipilih sedemikian rupa sehingga sampel yang dibentuk tersebut dapat mewakili sifat-sifat populasi. Tujuan penggunaan teknik *purposive sampling* adalah untuk mendapatkan sampel yang *representative* sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Jumlah sampel yang diambil sebanyak 70 orang pegawai, yang terdiri dari:

- 1) Kepala SKPD
- 2) Kepala Sub Bagian Keuangan dari masing-masing SKPD.

Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda ditunjukkan dengan persamaan berikut.

$$KLK = a + \beta_1SAK + \beta_2TI + \beta_3SPI + \beta_4SDM + e \dots\dots\dots(1)$$

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1
Hasil Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Akuntansi Keuangan (X1)	49	9	40	31.43	6.529
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	49	16	30	23.88	3.486
Sistem Pengendalian Intern (X3)	49	12	25	19.49	2.952
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	49	8	25	19.27	3.707
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	49	13	25	19.96	3.240
Valid N (listwise)	49				

Sumber : Data Diolah (2021)

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 2
Hasil Uji Regresi Linear Berganda Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	5.601	2.350		2.383	.022
Sistem Akuntansi Keuangan (X1)	.207	.087	.417	2.383	.022
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)	-.106	.179	-.114	-.592	.557
Sistem Pengendalian Intern (X3)	.223	.164	.203	1.360	.181
Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4)	.313	.120	.358	2.600	.013

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan analisis data dengan menggunakan SPSS, maka diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut:

$$KLK = 5,601 + 0,207X1 + -0,106X2 + 0,223X3 + 0,313X4 + e$$

Hasil Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,056 lebih besar dari nilai $\alpha = 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* pada masing- masing variabel lebih besar dari 0,100, demikian pula dengan nilai VIF masing- masing variabel yang lebih kecil dari 10,00. Hal ini berarti model regresi bebas dari masalah multikolinearitas atau tidak terjadi gejala multikolinearitas.

3) Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai signifikan pada masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti model regresi yang digunakan bebas dari heteroskedastisitas atau tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Hasil Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2) Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 ^a	.588	.550	2.172

A. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4), Sistem Pengendalian Intern (X3), Sistem Akuntansi Keuangan (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Sumber : Data diolah (2021)

Berdasarkan Tabel 6 tentang uji koefisien determinasi dapat dilihat bahwa nilai statistik sebesar 0,550 yang mendekati 1, hal ini menunjukkan bahwa Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia memberikan seluruh informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi terjadinya variabel kualitas laporan keuangan. Nilai *adjusted R²* sebesar

0,550 yang berarti 55,0 persen variasi dari kualitas laporan keuangan dapat dijelaskan oleh variabel bebas yaitu variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, sedangkan sisanya sebesar 45,0 persen dipengaruhi oleh faktor lain diluar model.

Uji Simultan (Uji F)

Tabel 7
Hasil Uji Simultan (Uji F)
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	296.265	4	74.066	15.694	.000 ^b
Residual	207.654	44	4.719		
Total	503.918	48			

A. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan (Y)

B. Predictors: (Constant), Kompetensi Sumber Daya Manusia (X4), Sistem Pengendalian Intern (X3), Sistem Akuntansi Keuangan (X1), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X2)

Sumber : Data diolah (2021)

Hasil uji F berdasarkan Tabel 7 menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, ini berarti bahwa model regresi layak atau dapat digunakan untuk memprediksi kualitas laporan keuangan dan dapat dilanjutkan untuk pengujian hipotesis.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Berdasarkan Tabel 2 menunjukkan bahwa:

- 1) Sistem Akuntansi Keuangan memiliki t sebesar 2.383 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,022, lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis pertama (H₁) diterima.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki t sebesar -0.592 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,557, lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis kedua (H₂) ditolak
- 3) Sistem Pengendalian Intern memiliki t sebesar 1.360 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,181, lebih besar dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis ketiga (H₃) ditolak.
- 4) Kompetensi Sumber Daya Manusia memiliki t sebesar 2.600 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,013, lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sehingga hipotesis (H₄) diterima.

Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis pertama menyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H₁ diterima. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif sistem akuntansi keuangan terhadap kualitas laporan keuangan.

Sistem akuntansi adalah prosedur-prosedur yang harus dilaksanakan untuk menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak di dalam dan di luar organisasi. Semakin baik sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam pemerintah daerah Kabupaten Badung maka semakin baik serta berkualitas pula laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Garung (2018), Aida (2019) serta Triwardana (2017) yang menyatakan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis kedua menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga H₂ ditolak. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah disebutkan bahwa untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance). Maka dari itu pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah. Pemerintah juga wajib menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Namun hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dikarenakan dalam proses pengelolaan keuangan/akuntansi hingga pembuatan laporan keuangan masih belum semua terkomputerisasi atau masih ada yang dilakukan secara manual. Peneliti menduga ada keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang tidak dapat mengoptimalkan peran teknologi informasi dalam proses akuntansi. Walaupun komputer yang dimiliki sudah cukup banyak dan tersambung dengan jaringan internet, akan tetapi untuk proses pengiriman informasi dan komunikasi para pegawai masih belum bisa memanfaatkan fasilitas dengan maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi informasi yang canggih tidak akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang akurat dan baik apabila sumber daya manusia yang ada tidak dapat mengoptimalkan kemampuan teknologi tersebut.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Kamusi (2019) dan Ningrum (2018) yang menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga dalam penelitian ini H₃ ditolak. Penelitian ini tidak berhasil membuktikan adanya pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan.

Hasil pengujian menyatakan sistem pengendalian intern tidak mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Sistem Pengendalian Intern yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Badung sudah baik, namun belum dijalankan secara efektif dan efisien, sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hal ini berarti dengan adanya sistem pengendalian intern tidak menjamin pemerintah daerah akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas jika tidak dijalankan secara efektif dan efisien karena kurangnya kecakapan karyawan atau pegawai. Sebab kecakapan karyawan atau pegawai merupakan salah satu unsur penting didalam sistem pengendalian intern karena keberhasilan suatu organisasi secara keseluruhan tergantung pada prestasi dan sikap karyawan atau pegawai. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Chalili (2019) dan Aida (2019) yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan dan mendukung penelitian dari Mokoginta,dkk (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Hipotesis keempat menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga H_4 diterima. Penelitian ini berhasil membuktikan adanya pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Hal ini berarti semakin berkompeter sumber daya manusia yang dimiliki maka semakin berkualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Dengan adanya kompetensi sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai keahlian di bidang akuntansi, memudahkan suatu instansi untuk melaksanakan fungsi dan kewenangan mencapai tujuan serta menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik. Penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Darmawan dan Darwanis (2018) serta Triyanti (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

SIMPULAN

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Berdasarkan hasil analisis data yang sudah dilakukan dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adapun kesimpulan yang diperoleh adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan dan Kompetensi Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sebagai.

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan dan keterbatasan ini diharapkan dapat disempurnakan pada penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Objek dari penelitian yang dijadikan sampel masih terbatas, baik itu dari segi jumlah sampel ataupun luas daerah populasi, karena penelitian ini hanya dilakukan di Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, sehingga tidak dapat mewakili Pemerintah Daerah yang ada di seluruh Bali. Maka saran peneliti sebaiknya populasi atau wilayah penelitian selanjutnya diperluas agar dapat memperoleh kesimpulan dari kualitas laporan keuangan yang ada pada Pemerintah Daerah seluruh Bali.
- 2) Penelitian ini menggunakan instrument berupa kuesioner yang disebar dengan menggunakan *google form*. Peneliti tidak dapat mengetahui apakah responden penelitian mengisi pernyataan dengan benar, seksama dan bersungguh-sungguh atau terpengaruh oleh faktor lain. Penelitian selanjutnya diharapkan turut mengawasi dan mengamati lebih detail bagaimana responden melakukan pengisian kuesioner atau melakukan wawancara secara langsung terhadap responden agar data yang diperoleh lebih akurat atau valid secara eksternal maupun internal.
- 3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian dengan menambahkan variabel yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan misalnya variabel tingkat pemahaman akuntansi dan pengalaman kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Aida, F. N. A. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan

- Keuangan Pemerintah Daerah. (*Doctoral dissertation*, Universitas Jenderal Soedirman).
- Andayani, Woro Sri. 2017. Pengembangan Sistem Pengendalian Internal Atas Penerimaan Kas Pada Unit Usaha di Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Universitas Negeri Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.
- Apriyanti, E., Budi Septiawan, S. E., dan MSi, M. (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (Sdm) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (*Survey pada Pemerintahan Kota Bandung*) (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).
- Chalili, Achmad. 2019. Pengaruh Pemahaman Auntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep, Madura. *Skripsi*. Fakultas Bisnis. Universitas Katolik Widya Mandala. Surabaya.
- Darmawan, Ayang dan Darwanis. 2018. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPA Provinsi Aceh. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Syariah Kuala Aceh.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75.
- Dewi, D. A. P. A. C., Herawati, N. T., AK, S., dan Purnamawati, I. G. A. (2015). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengalaman Kerja Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD di Kabupaten Jembrana). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 3(1).
- Garung, Godefridus Yulian. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi pada satuan kerja perangkat daerah di kabupaten Manggarai Timur, NTT). *Skripsi*. Fakultas Bisnis. Universitas Katolik Widya Mandala. Surabaya.
- Girsang, H.A.V., dan Yuyetta, E.N.A. (2015). Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah (*Studi pada LKPD Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2012*) (*Doctoral dissertation*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Kamasan,Wayan,A.A. Gede Raka dan I Made Sumada. 2019. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis AkruaL Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Pemerintah Kabupaten Badung. *Skripsi*. Pascasarjana Universitas Warmadewa Denpasar. Bali.
- Kamusi, Claudia Cyndrila. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Sikka. *Skripsi*. Fakultas Bisnis. Universitas Katolik Widya Mandala. Surabaya.
- Kiranayanti, I., dan Erawati, N. (2016). Pengaruh Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemahaman Basis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E- Jurnal Akuntansi*, 16(2), 1290-1318.
- Manik, T., dan Kusasi, F. (2019). Kualitas Laporan Keuangan Dan Pencegahan Fraud Di Provinsi Kepri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 3(1), 17-32.
- Mokoginta, N., Lambey, L., dan Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern

- Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 12(2).
- Nadir, Rasyidah dan Hasyim. 2017. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua (Studi Empiris di PEMDA Kabupaten Barru). *Skripsi*. Jurusan Akuntansi. Universitas Politeknik Negeri Ujung Pandang. Indonesia.
- Ningrum, Khoirina Kencana. 2018. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Priyani, Ama Julia. 2020. Pengaruh Etika Kepemimpinan, Fungsi Badan Pengawas, Pengalaman Kerja, dan Tingkat Pemahaman Akuntansi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kota Denpasar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Denpasar
- Pujanira, P., dan Taman, A. (2017). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah provinsi diy. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 14-28.
- Sari, Lidya. A. N. (2020). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur) (*Doctoral dissertation*, UNIVERSITAS AIRLANGGA).
- Saifudin, S., dan Ardani, F. P. (2017). Sistem Informasi Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas dalam Meningkatkan Pengendalian Internal atas Pendapatan pada RSUP Dr. Kariadi Semarang. *Jurnal RAK (Riset Akuntansi Keuangan)*, 2(1), 123-138.
- Setiawan, I., dan, G. (2017). Pengaruh Akuntansi Berbasis Akrua, Sistem Pengendalian Intern Dan Motivasi Kerja Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*, 21(1), 671-700, sep. 2017. ISSN 2302-8556.
- Sulistiyowati, Ratna Indah. 2017. Pengaruh Kualitas SDM dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
- Syoleha, Maratun. 2016. Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (studi empiris pada SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Mercu Buana. Jakarta.
- Triwardana, D., Yusraini, Y., dan Susilatri, S. (2017). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd (*Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar*) (*Doctoral dissertation*, Riau University).
- Yanti, Sunita. 2018. Pengaruh Etika Kepemimpinan, Kualitas Sistem Informasi Akuntansi, Fungsi Badan Pengawas, Tingkat Pemahaman Akuntansi dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kota Denpasar. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi. Universitas Mahasaraswati Denpasar. Denpasar

Yunita, Sella. 2019. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (studi kasus pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Universitas Islam Negeri. Raden Intan Lampung.